Analisis Kesenjangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat Serta Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesenjangan pada Tahun 2017-2022

Oleh:

Nama	: Tanisa Humaida Adia Putri
Nomor Mahasiswa	: 20313004
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2023

Analisis Kesenjangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat Serta Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesenjangan pada Tahun 2017-2022

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Tanisa Humaida Adia Putri

Nomor Mahasiswa : 20313004

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 April 2024



Tanisa Humaida Adia Putri

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Kesenjangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat Serta Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesenjangan pada Tahun 2017-2022

Nama	: Tanisa Humaida Adia Putri
Nomor Mahasiswa	: 20313004
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 25 Maret 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Diana Wijayanti S.E., M.Si.

CS Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Kesenjangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat Serta Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesenjangan pada Tahun 2017-2022

Disusun oleh : Tanisa Humaida Adia Putri

Nomor Mahasiswa : 20313004

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal : Selasa, 7 Mei 2024

Pembimbing Skripsi : Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Penguji : Indah Susantun, Dra., M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bagi segala puji syukur akan kehadirat Allah SWT juga limpahan karunia serta nikmat-Nya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Sholawat dan juga salam saya junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah manusia menjalani kehidupan didunia.

Skripsi ini merupakan karya akhir sebagai persembahan untuk orang-orang sekitar saya yang dengan berbaik hati bersedia merangkul kesulitan-kesulitan penulis.

Kepada Ayah dan Ibu yang jiwa dan raganya selalu menjadi tempat pulang terbaik didunia, yang doanya selalu membersamai dan tutur katanya penuh harapan namun tanpa tuntutan, serta yang memeluk dan meredam ambisi anak perempuan pertamanya yang seringkali lupa untuk memberi nafas pada tiap langkahnya.

Tidak lupa, terima kasih kepada diri saya sendiri yang senantiasa berbaik hati dan bekerja keras untuk merawat dirinya sendiri, menjaga nilai hidupnya, dan berbesar hati mengusahakan sembuhnya bagi yang butuh.

Kemudian, terima kasih kepada teman-teman saya karena telah mengisi sisa ruang kosong dalam hati saya sehingga sebagian cintanya ada untuk kalian.

Terimakasih saya haturkan kepada seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan

Terimakasih banyak kepada Dosen Pembimbing saya yang penuh akan kesabaran dan pengharapan baik kepada penulis.

Atas segala kebaikan bagi orang-orang yang terlibat, semoga diberi-Nya hal-hal baik dalam hidupnya.

MOTTO

"Failure is never easy, but there will never be gratitude without failure. Only mocking of the fools and feeling superior. One thing for sure, even the hardest rain always has its end"

KATA PENGANTAR



Assamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang sudah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Sholawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam kehidupan sehingga pengikutnya bisa merasakan damainya hidup dan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang taat. Atas izin Allah SWT, Tugas Akhir skripsi yang berjudul **"Analisis Kesenjangan Antar Wilayah Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2017-2022"** bisa diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini adalah prasyarat yang hukumnya wajib untuk dipenuhi sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Program Sarjana (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian masa studi sampai dengan finalisasi penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta berbagai macam masukan dari kalangan. Karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Univeristas Islam Indonesia
2. Bapak Abdul Hakim S.E., M.Ec. sebagai Kepala Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Diana Wijayanti S.e., M.Sc. sebagai Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, kemudahan, serta berbagai saran kepada penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Universitas Islam Indonesia yang menebarkan wawasan dan pandangan baru bahkan kebahagiaan di lingkungan kampus kepada kami.

5. Xaviera Unisi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk tetap mengembangkan potensi dan terlibat diberbagai macam acara.
6. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, dorongan, semangat, afirmasi positif, pelajaran hidup, dan menjadikan alasan tetap bertahan kepada penulis.
7. Seluruh teman terdekat yang telah bekerja keras dalam mendedikasikan sebagian dirinya untuk mengirimkan banyak hal baik dalam senang maupun susah.
8. Nadin Amizah yang melalui susunan melodi dan syairnya selalu memberikan kekuatan dan keyakinan penulis dalam menjalani baik buruk, kurang lebih, serta manis pahitnya proses kehidupan.
9. Semua keterlibatan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan saya agar skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang diluar sana khususnya mahasiswa, dosen, bahkan pemerintah dalam meninjau kondisi ekonomi secara lebih mendetail.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2024



Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1.3.1 Tujuan Penelitian 9
1.3.2 Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 10
2.1 Kajian Pustaka 10
2.2 Landasan Teori 12
2.2.1 Ketimpangan Wilayah 12
2.2.2 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 14
2.2.3 Belanja Langsung 14
2.2.4 Belanja Tidak Langsung 14
2.2.5 Tenaga Kerja 14
2.2.6 Indeks Williamson 15
2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 15
2.3. Hubungan Antar Variabel 16
2.4 Kerangka Pemikiran 16
2.5 Hipotesis Penelitian 18
BAB III METODE PENELITIAN 19
3.1 Jenis dan Sumber Data 19
3.2 Variabel Penelitian 19
3.3 Metode Analisis 21
3.4 Uji Kesesuaian Model 22

3.5 Pengujian Statistik 23
BAB IV PEMBAHASAN 26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 50
DAFTAR PUSTAKA 43
LAMPIRAN 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 4
Gambar 1. 2 PDRB dan IPM Kota di Provinsi Jawa Barat 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Derajat Desentralisasi Fiskal Per Provinsi 2022 6
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif 26
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Pengujian CEM, FEM, dan REM 28
Tabel 4. 3 Uji Chow 29
Tabel 4. 4 Uji Hausman 30
Tabel 4. 5 Model Terbaik Fixed Effect 31
Tabel 4. 6 Hasil Uji t-statistik (a=1%) 34

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau, keberagaman tiap daerah di Indonesia merupakan konsekuensi yang tak terelakkan. Karakteristik berbeda yang ada di tiap wilayah sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, sehingga hal tersebut menyebabkan model pembangunan ekonomi Indonesia tentu saja tidak seragam. Keberagaman ini mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk tumbuh, maka akan selalu ada gap antar wilayah dimana beberapa wilayah mampu berkembang dengan cepat sedangkan wilayah lainnya berkembang lebih lambat.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai penjabaran analisis ketimpangan wilayah antar kota di Provinsi Jawa Barat serta faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2017-2022 yang diproyeksikan lewat Indeks Williamson. Penelitian menggunakan data lima variabel independen yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. Adapun variabel dependennya merupakan kesenjangan wilayah antar kota. Analisis regresi data panel dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan dalam menganalisis variabel dalam penelitian ini.

Pengolahan serta pengujian dalam penelitian menunjukkan bahwa Belanja Langsung, Belanja Tidak Langusng, Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap kesenjangan wilayah antar kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Derajat Desentralisasi Fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap kesenjangan wilayah antar kota di Provinsi Jawa Barat. Penulis berharap penelitian dapat dijadikan referensi dalam mengatasi kesenjangan wilayah antar kota khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : Kesenjangan Wilayah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau, keberagaman tiap daerah di Indonesia merupakan konsekuensi yang tak terelakkan. Karakteristik berbeda yang ada di tiap wilayah sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, sehingga hal tersebut menyebabkan model pembangunan ekonomi Indonesia tentu saja tidak seragam. Keberagaman ini mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk tumbuh, maka akan selalu ada gap antar wilayah dimana beberapa wilayah mampu berkembang dengan cepat sedangkan wilayah lainnya berkembang lebih lambat.

Gap antar wilayah merupakan hal yang menggambarkan situasi adanya kesenjangan akibat tidak meratanya banyak aspek di setiap wilayah. Menurut (Adisasmita, 2014) kesenjangan wilayah sendiri merupakan kondisi dimana distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan antar wilayah mengalami perbedaan dan ketidakselarasan. Berdasarkan data pada Tahun 2020, kesenjangan di Indonesia relatif tinggi, khususnya yang terjadi pada wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir ketimpangan adalah adanya penerapan kebijakan fiskal lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Wujud APBN mengarah pada sebuah aturan yang diciptakan oleh Pemerintah yang berfungsi dalam perekonomian melalui pengeluaran dan pemasukan (pajak pemerintah). Dalam ruang fiskal, derajat desentralisasi memiliki peran terhadap pengendalian fungsi Fiskal yang dapat mengukur besarnya kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan daerah, konsep pengukuran tersebut biasa disebut dengan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Semakin besar derajat fiskal pada sebuah wilayah, maka semakin meningkat pula kemampuan sebuah wilayah dalam menghimpun penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mengukur tingkat kemampuan wilayah untuk tidak bergantung pada pemerintah pusat. Kemampuan PAD yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap

meningkatnya kualitas ruang fiskal, hal ini terjadi karena PAD bukan merupakan transfer yang berasal dari pemerintah pusat sehingga sebuah wilayah dapat secara mandiri mengembangkan daerahnya dan dapat meminimalisir ketimpangan yang terjadi disetiap wilayah.

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah bisa mempengaruhi kesempatan kerja, tingkat investasi, pendapatan dan penghasilan nasional. Namun pada (Kajian Bappenas, 2019) yang meneliti kontribusi belanja negara tahun 2016-2017 terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2018, memberikan pernyataan bahwa meski pengeluaran pemerintah khususnya belanja pemerintah meningkat tetapi peningkatan tersebut hanya mampu mendorong 0,24% pertumbuhan ekonomi dimana angka tersebut jauh dari target yaitu 0,66%. Artinya kebijakan fiskal belum berfungsi optimal dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh alokasi anggaran yang belum tepat pada sasaran dan membuat kesenjangan hadir menjadi masalah yang krusial (Nasution, 2020).

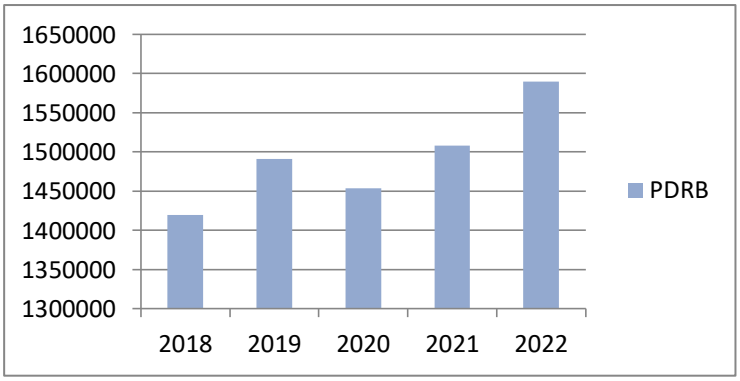
Dewasa ini, menurut artikel kementrian keuangan dalam penelitian Alvaro (2022) secara lebih mendetail mencatat bahwa belanja barang dan jasa termasuk belanja pegawai dinilai dominan dengan proporsi sebesar 24,28 persen untuk belanja barang dan jasa dan 34,85 persen untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja modal tercatat hanya mendapatkan proposi sebesar 19,19 persen. Kecilnya proporsi bagi belanja modal mengakibatkan program pembangunan daerah seperti infrastruktur cenderung kurang mendapat perhatian khususnya pada wilayah Timur dan Barat.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa di wilayah Barat yang berada pada peringkat mendominasi struktur ekonomi secara spasial dengan kontibusi PDRB sebesar 22,40 persen setelah DKI Jakarta dengan PDRB sebesar 29,47 persen dan Jawa Timur sebesar 25,25 persen (Bappeda Jawa Timur, 2022). Banyaknya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap output ekonomi yaitu PDRB yang diukur melalui produktivitas tenaga kerja. Meskipun berada pada peringkat pertama dengan penduduk terbanyak, produktivitas tenaga kerja Provinsi Jawa Barat justru hanya menduduki peringkat 22 dan DKI Jakarta berada di peringkat pertama (pdrb nasional, 2023). Hal disebabkan oleh DKI Jakarta merupakan Ibukota sehingga menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional.

Dalam penelitian (Endarwati U. , 2017) tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia memiliki peran yang penting sebagai modal utama dalam perekonomian. Adanya pembangunan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) agar terbentuknyaa manusia dengan kualitas yang mumpuni, dengan itu Indeks Pembangunan Manusia menjadi tanda dalam melihat kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Jika Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, maka akan memberikan gambaran meningkatnya tingkat kesejahteraan. Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Provinsi Jawa Barat adalah Bandung (81,96%) dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,55% dan terendah yaitu Kota Banjar (71,92%) dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,31% dimana menjadi kota dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia terkecil kedua setelah Kota Cimahi. Adanya ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia yang terbilang besar ini dapat dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di suatu wilayah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bandung adalah sebesar 10,99 tahun sedangkan Banjar berada pada angka 8,77 tahun. Selanjutnya, Kota Bandung menempati peringkat pertama dengan Harapan Lama Sekolah tertinggi yaitu 14,21 tahun sedangkan Kota Banjar sebesar 13,24 tahun.

Berkaca pada beberapa kejadian tersebut, ketimpangan ini terjadi pada mekanisme pembangunan manusia, indikator pembentuknya menjadi sebuah gambaran dari adanya ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah kota (Bappenas, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik, ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia pada bidang pendidikan dapat dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Artinya, pendidikan dapat berpengaruh terhadap kesenjangan antar wilayah karena berhubungan dengan kondisi demografis suatu wilayah. Salah satu yang mempengaruhi permintaan pendidikan ialah PDRB di suatu wilayah (Septiani, 2022). Adapun grafik pertumbuhan ekonomi dalam PDRB sebagai berikut.

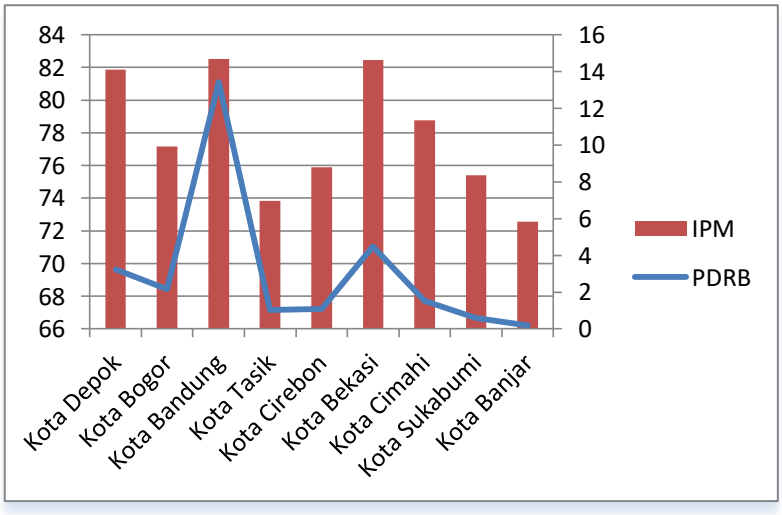
Gambar 1. 1*. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022*



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah)

Dalam rentang waktu 5 tahun yakni 2018-2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami naik turun yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang perlahan turun dan kembali memulihkan kinerja yang positif atas lapangan usaha, meski begitu tidak semua lapangan usaha merasakan dampak pemulihan pandemi Covid-19 karena diantaranya masih tumbuh negatif (Apriliani, 2023). Jika dilihat grafik PDRB dan IPM setiap kota Provinsi Jawa Barat ialah sebagai berikut.

Gambar 1. 2 *PDRB dan IPM Kota di Provinsi Jawa Barat*



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah)

Kota Banjar merupakan kota dengan PDRB terendah pada tahun 2022 yang diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia pada posisi terendah sebagai kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan PDRB pada peringkat pertama diduduki oleh Kota

Bandung yang juga diikuti oleh Indeks Pembangunan Manusia pada peringkat satu (Badan Pusat Statistik Jawa Barat). Besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjelaskan seberapa jauh kemampuan daerah dalam memanfaatkan ketersediaan sumber daya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, kondisi perekonomian juga dapat ditinjau melalui besarnya jumlah belanja daerah di daerah tersebut (Rahman & Chamelia, 2014). Belanja daerah secara mendasar merupakan salah satu komponen utama dalam APBD.

Struktur APBD menurut kementrian keuangan (2019) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Belanja Daerah merupakan pengurangan nilai kekayaan secara bersih sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban suatu daerah dalam kurun waktu tahunan (DJPK Kementrian Keuangan). Belanja Daerah kemudian dijabarkan menjadi 2 jenis yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dimana Belanja Barang dan jasa serta Belanja Infrastruktur merupakan bagian dari Belanja Langsung. Hal tersebut tertulis didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, kelompok Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang memuat belanja infrastruktur.

Menurut penelitian terdahulu (Rosmeli, 2014) belanja langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi, namun belanja tidak langsung tidak berpengaruh signifikan. Penelitian mengenai keberpengaruhan belanja langsung sejalan dengan (Silviana & Tallo, 2020) yang menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas barang dan jasa dalam hal ini alokasi belanja langsung, sebagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan wilayah. Hal ini juga disebutkan dalam buku (Sjafrizal, 2008) bahwa kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa akibat tidak memadainya infrastruktur suatu wilayah menjadi faktor penyebab ketimpangan pembangunan wilayah. Menurut Kajian Fiskal Nasional Kementrian Keuangan pada tahun 2021 belanja infrastruktur masuk kedalam potensi ketiga dari tiga potensi ekonomi Jawa

Barat yang perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah agar ketahanan ekonomi nasional bisa terjaga.

Adapun belanja tidak langsung, tertulis didalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Pada tahun 2018 belanja tidak langsung mengalami penurunan rasio dari tahun sebelumnya sebesar 0,1 persen dimana pada tahun 2017 diketahui sebesar 238,1 triliun (21,7%) menjadi 249,1 triliun (21,6%) pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian Gratia & Nugroho (2020) Belanja Tidak Langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Dinyatakan juga pada penelitian bagaswati (2017) bahwa Belanja Tidak Langsung memliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan wilayah pada keenam Provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan, berdasarkan Finuliyah & Khusaini (2022) penggunaan desentralisasi fiskal yang berimplikasi langsung terhadap keuangan daerah di Pulau Jawa dianggap hanya berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan ketimpangan wilayah masih bisa dirasakan oleh beberapa wilayah di Pulau Jawa termasuk Provinsi Jawa Barat. Ini menandakan bahwa semakin besarnya alokasi belanja tidak langsung yang dikeluarkan maka akan berpengaruh pada peningkatan ketimpangan wilayah. Jika dilihat melalui Derajat Desentralisasi Fiskal yang menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 berada di peringkat keempat setelah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Bali.

Tabel 1. 1 *Derajat Desentralisasi Fiskal Per Provinsi 2022*

Provinsi	DDF (%)	Provinsi	DDF (%)	Provinsi	DDF (%)
Aceh	12%	Jawa Tengah	27%	Sulawesi Utara	12%
Sumatera Utara	19%	DIY	27%	Sulawesi Tengah	13%
Sumatera Barat	16%	Jawa Timur	30%	Sulawesi Selatan	19%
Riau	19%	Banten	41%	Sulawesi Tenggara	10%
Jambi	15%	Bali	35%	Gorontalo	12%
Sumatera Selatan	16%	NTB	18%	Sulawesi Barat	10%

Table 1.1 Tabel Lanjutan

Bengkulu	11%	NTT	9%	Maluku	7%
Lampung	17%	Kalimantan Barat	16%	Maluku Utara	8%
Kep. Bangka Belitung	16%	Kalimantan Tengah	14%	Papua Barat	4%
Kep. Riau	23%	Kalimantan Selatan	20%	Papua	5%
DKI Jakarta	66%	Kalimantan Timur	22%		
Jawa Barat	32%	Kalimantan Utara	12%		

Sumber : Direktorat Jendal Perimbangan Keuangan (diolah)

Tabel diatas menunjukan bahwa tingkat kemandirian Provinsi Jawa Barat berada diangka 32 persen. Semakin tinggi angka DDF maka akan semakin meningkat pula Tingkat kemandiriannya. Angka tersebut masuk kedalam kategori wilayah dengan kemandirian rendah dimana ketergantung wilayah terhadap pemerintah masih besar.

Dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), pembanding yang merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri adalah PAD (Alvaro, 2020) sehingga secara tidak langsung PAD mempengaruhi pengeluaran daerah. PAD yang tinggi akan berpengaruh terhadap kekuatan derajat desentralisasi fiskal suatu wilayah. Berdasarkan penelitian (Siagian, 2010) desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2004-2008. Ini menunjukkan bahwa meski pertumbuhan ekonominya meningkat justru hal tersebut juga meningkatkan ketimpangan wilayah didalamnya. Menurut penelitian (Bartolini, Stossberg, & Blöchliger, 2016) salah satu komponen utama yang digunakan desentralisasi fiskal untuk mempengaruhi kesenjangan wilayah adalah desentralisasi pajak, kemudian disajikan dalam 2 plot yaitu ketimpangan wilayah terhadap otonomi perpajakan dan ketimpangan fiskal vertikal. Hubungan ketimpangan wilayah dengan otonomi perpajakan bersifat negatif, hal ini mendukung hipotesis bahwa besarnya tanggung jawab anggaran berhubungan dengan berkurangnya ketimpangan wilayah. Kemudian hubungan antara ketimpangan wilayah dengan ketimpangan vertikal fiskal mendukung

pernyataan bahwa belanja daerah yang tidak dibiayai oleh pajak daerah menyebabkan peningkatan ketimpangan wilayah.

Untuk itu, perlu dikaji kembali mengenai bagaimana kondisi ketimpangan antar wilayah antar kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2017-2022 mengingat terdapat beberapa ketidakkonsistenan dari berbagai penelitian atas variabel yang diujikan. Kemudian, untuk melihat juga pengaruh atas pernyataan pada tahun 2021 oleh Kemenkeu yang menyatakan bahwa belanja infrastruktur melalui belanja daerah merupakan salah satu hal krusial yang perlu dioptimalkan dalam upaya meminimalisir ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, penulis menyusun sejumlah masalah yang akan dibuktikan melalui penelitian diantaranya :

1. Apakah derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022 ?
2. Apakah belanja langsung memiliki pengaruh terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022 ?
3. Apakah belanja tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022 ?
4. Apakah tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022 ?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022.
2. Menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022.
3. Menganalisis pengaruh belanja tidak langsung terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022.
4. Menganalisis pengaruh Tenaga Kerja kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022.
5. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kesenjangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

   Penelitian dapat digunakan sebagai penerapan ilmu ekonomi khususnya pada mata kuliah kebijakan fiskal yang dipelajari pada perkuliahan serta sebagai wawasan baru terhadap kondisi riil yang terjadi pada perekonomian daerah.

2. Bagi Masyarakat

   Sumber informasi tambahan mengenai kondisi nyata pengaruh sektor kebijakan fiskal dalam kesenjangan antar daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi Peneliti

   Bermanfaat sebagai sumber gagasan yang ilmiah serta rujukan dalam penelitian lebih lanjut.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Bab ini berisi penjabaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memuat keterkaitannya terhadap Analisis Kesenjangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat Serta Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesenjangan pada Tahun 2018-2022. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan riset serta penelitian sebagai sumber referensi atas dukungan penelitian ini dan sebagai pembanding atas keabsahan hasil analisisnya. bbAdapun berbagai riset dan penelitiannya yaitu :

Dalam penelitian Gratia dan Nugroho (2020) berjudul Analisis Ketimpangan antar Wilayah di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dan dengan jenis data panel. Sejumlah 5 variabel dilibatkan dalam penelitian tersebut yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Inflasi, dan Tenaga Kerja. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Langsung, dan Tenaga memiliki pengaruh positif terhadap kesenjangan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Sedangkan variabel Belanja Tidak Langsung dan inflasi memiliki pengaruh negatif yang disebabkan karena meski Belanja Tidak Langsung dan Inflasi memiliki hubungan antara inflasi dengan suku bunga positif, namun hubungan antara suku bunga dengan GDP riil adalah negatif dimana jika GDP riil turun maka inflasi akan mengalami peningkatan yang berdampak pada kesenjangan.

Berdasarkan penelitian Endarwati (2017) dalam penelitiannya berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Jawa. Data yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah data sekunder dengan variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel dependen kemudian variabel investasi (X1) dan Tenaga Kerja (X2) sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut adalah Tenaga Kerja secara parsial memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinis Pulau Jawa karena struktur ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa cenderung mengalami transformasi

ke sektor industri atau pelayanan jasa yang ditandai oleh terciptanya penyerapan tenaga kerja dari sekor pertanian menuju pada sektor industri atau pelayanan jasa.

Menurut Silviana & Tallo (2020) melakukan riset yang berjudul "Analisis Ketimpangan dan Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat ketimpangan melalui perhitungan Indeks Williamson serta analisis *Klassen Typologi* untuk mengetahui posisi ekonomi relatif secara lebih luas di suatu wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut analisis *Klassen Typologi,* Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 4 tipe yaitu daerah maju dan tumbuh cepat, daerah berkembang cepat, daerah maju namun tertekan, dan daerah realtif tertinggal. Adapun faktor yang mempengaruhi ketimpangan menurut penelitian ini adalah perbedaan Sumber Daya Alam dan kondisi demografis, minimnya fasilitas yang mendukung mobilitas barang dan jasa, alokasi dana tiap wilayah berbeda, dan konsentrasi aktivitas ekonomi wilayah.

Berdasarkan penelitian Bartolini, Stossberg & Blöchliger (2016) melakukan penelitian mengenai "Fiscal Decentralisation and Regional Disparities". Penelitian tersebut menggunakan variabel kewenangan perpajakan, otonomi belanja, dan ketidakseimbangan fiskal vertikal. Menggunakan analisis empiris yang dilakukan pada 30 sampel dari Negara yang tergabung kedalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam periode 1995-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur fiskal seimbang dimana belanja daerah sebagian besar dibiayai oleh pajak daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal dapat mengurangi kesenjangan regional dengan memberikan insentif untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi.

Menurut penelitian Fleisher dan Zhao (2010) melakukan penelitian yang berjudul "*Human capital, economic growth, and regional inequality in China*". Metodelogi yang digunakan adalah estimasi elastisitas output dari ketiga input – modal fisik dan dua kategori tenaga kerja yaitu pekerja berpendidikan rendah dan pekerja terpelajar, untuk menghitung produk marginal faktor dan *Total Factor Productivity* (TFP). Hasil atas penelitian tersebut adalah bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif pada pertumbuhan output dan produktivitas studi lintas provinsi, kemudian ditemukan juga dampak langsung dan tidak langsung dari SDM terhadap

pertumbuhan TFP atau *Total Factor Productivity*. Pendidikan sendiri merupakan faktor yang meberikan dampak konisisten dibandingkan dengan adanya studi lintas Negara. Dampak langsung dapat dilihat dari aktivitas inovasi dalam negeri, sedangkan dampak tidak langsungnya adalah limpahan SDM terhadap pertumbuhan *Total Factor Productivity* (TFP). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis biaya manfaat investasi dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada bidang infrastruktur hanya memberikan keuntungan tinggi pada wilayah maju, tidak dengan wilayah pedalaman yang mendapat keuntungan lebih rendah, sedangkan investasi pada SDM dapat meberikan keuntungan yang sedikit lebih tinggi atau sebanding di wilayah pedalaman.

Penelitian ini menggunakan variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Tenaga Kerja sebagaimana penelitiannya Gratia dan Nugroho (2020) dan Bartolini, Stossberg & Blöchliger (2016). Kemudian, penelitian ini menggunakan variabel Tenaga Kerja sebagaimana penelitian Endarwati (2017). Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap kesenjangan wilayah sebagaimana dengan penelitian Silviana & Tallo (2020) yang menyebutkan bahwa kondisi demografis serta minimnya mobilitas barang dan jasa berpengaruh terhadap kesenjangan wilayah dan penelitian Fleisher dan Zhao (2010) yang menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap output serta produktivitas dalam suatu wilayah. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel belanja daerah sebagaimana penelitian Silviana & Tallo (2020) yang menyebutkan bahwa minimnya mobilitas barang dan jasa mempengaruhi kesenjangan wilayah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Wilayah

2.2.1.1 Hipotesa Neo-Klasik

Didalam analisa Teori Pertumbuhan Neo Klasik oleh Douglas C. North, ia mencetuskan sebuah hipotesa Neo-Klasik yang berisi perkiraan hubungan tingkat pembangunan ekonomi nasional dengan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dalam hipotesa tersebut, pada awal proses

pembangunan sebuah wilayah, ketimpangan antar daerah cenderung meningkat. Ini akan terus terjadi sampai ketimpangan menempati titik maksimum, maka pembangunan yang berlanjut akan mengurangi ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan di wilayah berkembang cenderung tinggi dibadingkan dengan wilayah maju, kurva ketimpangan pembangunan antar daerah berbentuk seperti huruf U terbalik.

Hipotesa ini telah diuji kebenaran oleh Williamson lewat studinya tentang ketimpangan pembangunan yang terjadi pada natar wilayah di Negara maju dan berkembang menggunakan data panel yang hasilnya menunjukkan hipotesa Neo-Klasik secara empiric terbukti benar.

2.2.1.2 Model Myrdal

Dalam tesis Hartono (2008) memuat teori yang dicetuskan oleh Myrdal (1975) dimana teori ini merupakan sebuah kritikan atas teori Neo-Klasik mengenai stabilitas pertumbuhan. Menurut Myrdal, majunya tingkat pembanguan antar wilayah yang berbeda-beda akan menciptakan dampak yang disebut *Spread Effect* (dampak sebar) didominasi oleh *Bachwas Effect* (dampak balik) serta pertumbuhan ekonomi regional ialah mekanisme yang tidak seimbang atau *disequilibrium*. Perbedaan yang terdapat pada model Myrdal dan Neo-Klasik yaitu, Myrdal menggunakan *increasing return to scale* dan teori Neo-Klasik *constant return to scale*. Disparitas tingkat pertumbuhan antar wilayah dianggap akan menjadi begitu besar jika terjadi keberlangsungan pada *increasing return to scale*. Kemudian berdasarkan pemaparan Kaldor (1970), *increasing return to scale* merupakan penyederhanaan atas berbagai prinsip yang merujuk pada penyebab secara kumulatif di perusahaan. Keadaan berbagai wilayah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan gambaran konsep mendasar atas teori ini. Kekuatan pasar lebih condong pada memperburuk kesenjangan antar wilayah (wilayah maju disandingkan dengan terbelakang). Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, daerah maju akan lebih mendapati akumulasi keunggulan kompetitif atau Myrdal menyebutnya dengan *Bachwas Effect*. Sedangkan *Spread Effect* sendiri didefinisikan sebagai sebuah pengaruh yang bersifat menguntungkan bagi daerah sekitar pusat pertumbuhan yang berasal dari aliran berbagai kegiatan investasinya.

2.2.1.3 Para Ahli Lainnya

Menurut Budi Winarno (2000), ketimpangan ialah sebuah akibat atas kegagalan pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan baik fisik dan psikis masyarakatnya pada suatu wilayah pada era globalisasi. Ketimpangan menurut Andrinof A. Chaniago dalam (Siallagan, 2019) ialah hasil pembangunan yang hanya memiliki fokus pada aspek ekonomi dan lupa akan aspek sosial.

2.2.2 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Berdasarkan jurnal kementrian keuangan Zukhri (2020) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) adalah penggambaran seberapa besar keuangan daerah mampu untuk membiaya kegiatan daerah yang diukur melalui jumlah PAD yang dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Kemudian menurut Rahmat et al (2014) dalam (Harto, Utami, & Wardhani, 2022) derajat desentralisasi fiskal merupakan tingkat kemandrian suatu wilayah dalam memberikan biaya kebutuhan wilayahnya sendiri atau tanpa bergantung pada pemerintah.

2.2.3 Belanja Langsung

Belanja langsung ialah anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan yang secara terkait (BPK RI). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung terdapat dalam Pasal 50 dimana kelompok Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

2.2.4 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung menurut Soleh & Rochmansjah (2010) ialah anggaran belanja yang tidak dipengaruhi langsung oleh berbagai usulan program kegiatan. Belanja Tidak Langsung dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

2.2.5 Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik tenaga kerja didefinsikan sebagai penduduk suatu wilayah yang berada di usia kerja yaitu 15 tahun keatas yang dianggap memiliki kemampuan dalam menghasilkan produksi barang & jasa.

2.2.5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partsisipasi Angkatan Kerja menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka (2023) merupakan penduduk usia diatas 15 tahun yang masuk kedalam angkatan kerja dan disajikan dalam bentuk dat persentase. Jika TPAK semakin tinggi maka pasokan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian yang tersedia juga akan semakin tinggi. Komponen TPAK adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

   Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2023) Tingkat Pengangguran Terbukan merupakan persentase banyaknya total pengangggguran terhadap banyaknya angkatan kerja.

2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

   Menurut Sukirno & Sadono (2006) kesempatan kerja ialah penggambaran kondisi tersedianya lapangan pekerjaan yang telah diisi oleh para pencari kerja. Maka, tingkat kesempatan kerja merupakan proporsi atas jumlah angkatan yang bekerja dalam bentuk persentase.

2.2.6 Indeks Williamson

Indeks Williamson menurut Badan Pusat Statistik (2021) ialah alat dalam mengukur pembangunan wilayah dalam suatu daerah yang dibandingkan dengan wilayah tertinggi. Secara mendasar, indeks Williamson ini mengukur besarnya kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah. Analisis Indeks Williamson digunakan untuk mengukur besarnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (Hasyim, 2015).

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia pada dasarnya merupakan alat dalam menganalisis dan mengukur tingkat kesenjangan wilayah yang dilihat melalui komponen-komponen Sumber Daya Mansusia dengan klasifikasi kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Indeks Pemabngunan Manusia merupakan sebuah indeks yang terbentuk atas rata-rata ukur yang berasal dari tiga dimensi utama dalam indeks ini yakni pembangunan manusia, pendidikan, dan standard hidup layak (Badan Pusat Statistik, 2020). Menurut BPS dalam (Fauzi, 2017) Indeks Pembangunan Manusia dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu IPM<60 rendah, 60 ≤ IPM <70 sedang, 70 ≤ IPM < 80 tinggi, dan IPM ≥ 80 sangat tinggi.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Wilayah

Dalam ruang fiskal, derajat desentralisasi memiliki peran dalam pengendalian fungsi Fiskal yang mampu mengukur besarnya kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan daerah, konsep pengukuran tersebut biasa disebut dengan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Semakin besar derajat fiskal pada sebuah wilayah, maka semakin meningkat pula kemampuan sebuah wilayah dalam menghimpun penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang dapat mengukur tingkat kemampuan wilayah untuk tidak bergantung pada pemerintah pusat. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kualitas ruang fiskal, hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah bukan merupakan transfer yang berasal dari pemerintah pusat sehingga sebuah wilayah dapat secara mandiri mengembangkan daerahnya dan dapat meminimalisir ketimpangan yang terjadi disetiap wilayah.

2.3.2 Hubungan Belanja Langsung dengan Ketimpangan Wilayah

Bentuk interverensi pemerintah daerah terhadap pembangunan suatu wilayah ditempuh melalui alat yang paling efektif yakni pengeluaran pemerintah karena pengeluaran daerah memiliki keterikatan yang lebih erat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Keputusan yang diambil dalam meangalokasikan anggaran belanja daerah disuatu wilayah akan berpengaruh terhadap besarnya ketimpangan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh wilayah-wilayah yang mampu mengalokasikan dananya pada hal-hal yang bersifat investasi dalam anggaran belanja langsung akan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari wilayah dengan alokasi belanja langsung yang sedikit (Gulo, Zamzami, & Bhakti, 2017).

2.3.3 Hubungan Belanja Tidak Langsung dengan Ketimpangan Wilayah

Salah satu komponen Belanja Tidak Langsung pemerintah adalah belanja bantuan sosial berupa uang serta barang jasa, belanja ini diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari berbagai kemungkinan atas resiko sosial serta mendorong kemampuan ekonomi dalam kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang desentralisasi fiskal yang berimplikasi langsung terhadap keuangan daerah di Pulau Jawa, belanja tidak langsung dianggap hanya berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan ketimpangan wilayah masih bisa dirasakan oleh beberapa wilayah di Pulau Jawa termasuk Provinsi Jawa Barat. Ini menandakan bahwa semakin besarnya alokasi belanja tidak langsung yang dikeluarkan maka akan berpengaruh pada peningkatan ketimpangan wilayah (Finuliyah & Khusaini, 2022).

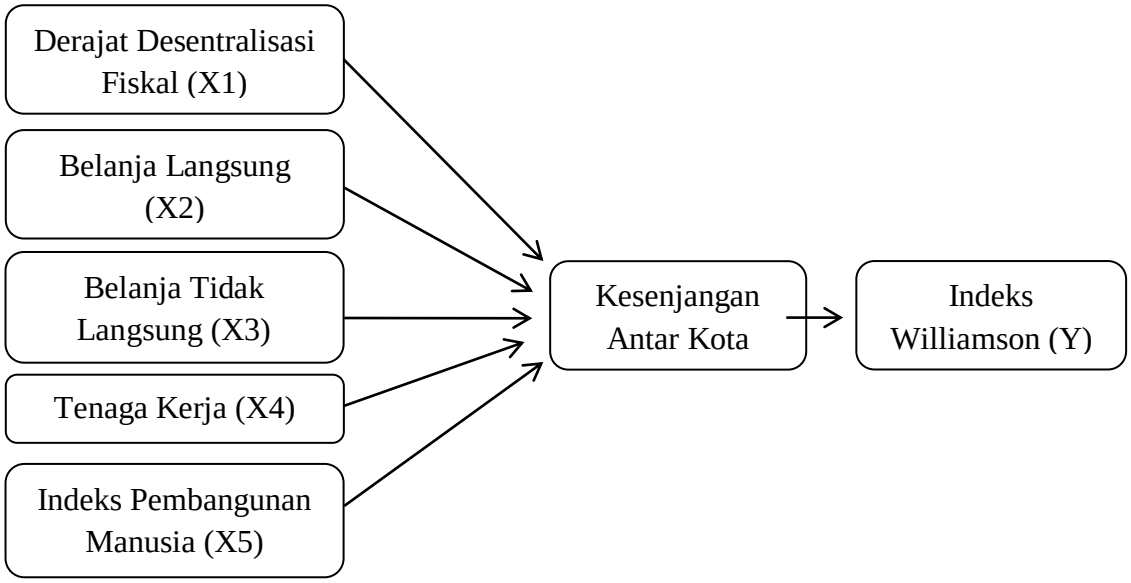
2.3.4 Hubungan Tenaga Kerja dengan Ketimpangan Wilayah

Tenaga Kerja merupakan gambaran Sumber Daya Manusia produktif yang berperan serta dalam proses pembangunan suatu wilayah, Sumber Daya Manusia berpengaruh positif pada pertumbuhan output dan produktivitas studi lintas provinsi (Fleisher, Li, & Zhao, 2010). Secara parsial, tenaga keja memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinis Pulau Jawa karena struktur ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa cenderung mengalami transformasi ke sektor industri atau pelayanan jasa yang ditandai oleh terciptanya penyerapan tenaga kerja dari sekor pertanian menuju pada sektor industri atau pelayanan jasa (Endarwati U. , 2017).

2.3.5 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Wilayah

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang didalamnya dapat memberikan gambaran mengenai capaian kesejahteraan yang disederhanakan kedalam beberapa indikator sehingga mampu merepresentasikan kemampuan masyarakat di suatu wilayah secara mendasar (Pandiangan, Priyarsono, & Probokawuryan, 2021). Menurut teori Endogen, investasi publik (pemerintah) dan juga swasta dalam bidang sumber daya yakni modal manusia mampu melahirkan ekonomi eksternal yang positif, yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, terdapat *spread effect* yang merupakan akibat dari tingginya pertumbuhan ekonomi sehingga membuat daerah sekitarnya dapat mereduksi kesenjangan ekonomi (Aprilianti & Harkeni, 2021).

2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

1. Diduga Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap sebuah kesenjangan antar wilayah kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga Belanja Langsung berpengaruh negatif terhadap kesenjangan antar wilayah kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap kesenjangan antar wilayah kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Diduga Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap kesenjangan antar wilayah kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kesenjangan antar wilayah kota di Provinsi Jawa Barat.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang terdiri atas 9 Kota di Provinsi Jawa Barat yakni, Kota Depok, Bogor, Bandung, Tasik, Cirebon, Bekasi, Cimahi, Sukabumi, dan Banjar. Data yang diambil merupakan data pada Tahun 2017-2022 yang peroleh dari website resmi seperti Kementrian Keunagan, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Selain itu, data juga diambil dari berbagai macam jurnal, e-book, dan artikel terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini.

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Terikat (Dependen)

Jeffrey G. Williamson sebagai penemu Indeks tersebut mengembangkan sebuah rumusan yang dinamakan Indeks Williamson. Adapun rumus Indeks Williamson sebagai berikut.

$$VW = \frac{\sqrt{\frac{\Sigma(\mathrm{Yi} - \mathrm{Y})\mathrm{Fi}}{\mathrm{N}}}}{Y}$$

Keterangan :

VW = Indeks Williamson

Yi = Pendapatan Per Kapita di wilayah ke-i

Y = Pendapatan Per Kapita rata-rata seluruh wilayah

Fi = Populasi wilayah ke-i

N = Populasi Total

Jika hasil perhitungan Indeks Williamson dekat dengan angka 1 (satu), atau lebih besar dari nilai 1, artinya tingkat kesenjangan yang terjadi adalah sangat tinggi. Kemudian jika perhitungan Indeks Williamson menghasilkan angka yang mendekati nol, artinya tingkat kesenjangan yang terjadi adalah sangat rendah atau menunjukkan telah terjadi pemerataan pada distribusi pendapatan yang dideskripsikan dengan satuan indeks.

3.2.2 Derajat Desentralisasi Fiskal (X1)

Untuk mendeskripsikan tingkat penerapan desentralisasi fiskal di provinsi Jawa Barat, maka digunakan Enhanced Fiscal Decentralization Index (EFDI) atau di Indonesia disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Adapun formula derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut.

$$DF_{it} = \frac{PAD_{it}}{TPD_{it}} \times 100\%$$

Dimana,

DF_{it} = derajat desentralisasi fiskal

PAD_{it} = pendapatan asli daerah provinsi i, tahun t

TPD_{it} = total penerimaan daerah provinsi i, tahun t

3.2.3 Belanja Langsung (X2)

Belanja langsung merupakan aktivitas belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan program dan aktivitas pemerintah daerah. Belanja ini meliputi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Salah satu aspek belanja langsung dalam penelitian menjadi sebuah topik penting yaitu belanja infrastruktur yang masuk kedalam belanja modal.

3.2.4 Belanja Tidak Langsung (X3)

Belanja ini merupakan belanja kegiatan belanja suatu daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung berisi, belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

3.2.5 Tenaga Kerja (X4)

Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk yang dianggap mempunyai keunggulan untuk bekerja secara produktif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebagai yang mewakili Tenaga Kerja adalah jumlah orang yang bekerja pada daerah tertentu dengan periode 2017-2022.

3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (X5)

Indeks Pembangunan Manusia (X5), dalam bahasa inggris *Human Development Index* (HDI) ialah sebuah indikator gabungan yaitu berisi kombinasi indikator tunggal yang dalam hal ini diantarnya aspek pendidikan, kesehatan, serta

aspek ekonomi untuk mengukur pencapaian atas kualitas pembangunan manusia (Badan Pusat Statistik, 2021). Besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia disajikan dalam proporsi persentase pada tahun 2017-2022 yang merepresentasikan besarnya kualitas dari aspek pembangunan manusia dan kualitas hidup yang baik maupun buruk bagi masyarakat. Pendekatan dari tiga dimensi dasar digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia diantaranya wawasan atau pengetahuan, umur panjang serta hidup sehat, dan standar hidup yang layak (Badan Pusat Statistik, 2014).

3.3 Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis dengan data panel yaitu : pertama, time series dan kedua, *Cross section*. Data tersebut digunakan untuk melihat apakah tingkat desentralisasi fiskal, belanja (langsung & tidak langsung), inflasi, dan labor berdampak pada kesenjangan antar daerah di Provinsi Jawa Barat. Eviews versi 12 merupakan alat analisis yang digunakan dalam menyelesaikan riset.

Penentuan model regresi data panel yang ditentukan oleh uji chow dan hausman. Uji chow digunakan dalam menentukkan apakah model regresi sebaiknya menggunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect* sedangkan Uji Hausman digunakan dalam menentukan apakah model regresi sebaiknya menggunakan *Random* atau *Fixed Effect*. Uji hausman dapat dilakukan ketikan uji chow menilai bahwa *Fixed Effect* merupakan pilihan terbaik dalam model regresi tersebut. Kesenjangan sendiri dihitung menggunakan Indeks Williamson.

3.3.1 Metode *Common Effect* (CEM)

Common Effect Model ialah sebuah pendekatan paling sederhana model data panel yang menggabungkan *data cross section* dan *time series*, dimensi waktu serta individu pada model ini tidak disoroti sehingga asumsi yang berlaku adalah perilaku dalam data dianggap sama di berbagai periode waktu. *Ordinary Least Square* (OLS) merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam metode ini, adapun persamaan statistiknya ialah :

$$IW_{it} = a + \beta_1 DDF_{it} + \beta_2 BL_{it} + \beta_3 BTL_{it} + \beta_4 TK_{it} + \beta_5 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

3.3.2 Metode *Fixed Effect* (FEM)

Menurut (Gujarat, 2010) *fixed effect model merupakan* metode yang memberi sebuah gambaran akan ketidaksamaan konstanta antar objek dimana penjelasan dalam perbedaan intersep di interpretasikan melalui variabel dummy. Dalam (Basuki, 2021) juga mengatakan bahwa model ini seringkali disebut *Least Square Dummy Variable.*

3.3.3 Metode *Random Effect* (REM)

Fixed effect model ialah pendekatan dengan dua bagian variabel gangguan yaitu yang terjadi secara umum atau general dan terjadi antar individu. Adapun perbedaannya dengan *fixed effect model*, *random effect* memiliki elemen *error* yang bersifat *random* pada setiap individu (Widarjono, 2018). Selain itu, variable dummy tidak digunakan pada *random effect model* seperti yang digunakan pada *fixed effect model*. REM ini mengestimasi sebuah data jenis data panel yang mana variabel gangguan mungkin memiliki hubungan baik antar waktu maupun antar individu (Rifkhan, 2023).

3.4 Uji Kesesuaian Model

3.4.1 Uji Chow

Tujuan dilakukannya Uji Chow ialah untuk menentukan model yang sesuai dalam estimasi data panel yaitu CEM atau FEM. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 : *Common effect*

Ha : *Fixed effect*

Keputusan diambil berdasarkan pada perbandingan antara F-statistik (Chow Statistik) terhadap F-tabel. Jika nilai dari F-statistik lebih besar dari nilai F-tabel, maka H0 terbukti tidak diterima sehingga model yang terpilih adalah FEM begitupun sebaliknya.

3.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman memiliki tujuan sebagai penentu model yang sesuai dalam estimasi data panel yakni FEM atau REM. Hipotesis yang dilakukan dalam uji hausman ialah sebagai berikut :

H0 : *Random effect*

Ha : *Fixed effect*

Keputusan diambil berdasarkan pada perbandingan statistik Hausman dengan Chi-square. Jika hasil menunjukkan bahwa H0 tidak diterima, maka kesimpulannya adalah bahwa *fixed effect model* akan digunakan.

3.4.3 Uji Signifikansi *Common Effect* vs *Fixed Effect*

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *cross-section chi-square* yang digunakan sebagai gambaran terkait *fixed effect model* tersebut sudah tepat jika dibandingkan dengan model regresi *common effect model*. Jika nilai *cross-section chi-square* lebih kecil dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan penulis, maka model yang terpilih dan tepat adalah *fixed effect model*.

3.5 Pengujian Statistik

Pengujian statistik digunakan dalam memberikan gambaran terkait ukuran suatu fungsi regresi dapat memberikan nilai tafsir yang sebenarnya, maka diperlukan uji selain uji asumsi klasik. Pengujian statistik ini dilakukan melalui analisis pada R^2 yang menjadi proyeksi koefisien determinasi, Uji T yang menjadi proyeksi secara individual, serta Uji F sebagai tahap pengujian mengenai koefisien regresi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran bagaimana tingkatan dalam suatu fungsi regresi bisa menyajikan nilai tafsir yang sebenarnya, sehingga bukan hanya dilakukan uji asumsi klasik, tapi juga pengujian statistik.

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi atau R^2 merupakan pengukuran dalam sebuah regresi sebagai penggambaran atas jumlah variasi dari variabel terikat. Menurut (Sugiyono, 2019) koefisien determinasi digunakan dalam penetuan besranya persentase pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen atau melihat besaran kemampuan variabel independen menggambarkan varaibel dependen. Adapun rentang nilai koefisien determinasi ada pada rentang angka 0-1, semakin dekat dengan angka 1 maka semakin kuat.

3.5.2 Uji t

Menurut Ghozali dalam (Jatiningrum & Marantika, 2021), uji t atau uji parsial memiliki tujuan dalam memberikan gambaran besarnya pengaruh satu variabel

bebas (independen) secara individual dalam menjelaskan variasi atas variabel terikat. Uji t merupakan hal mendasar dalam pengambilan keputusan terkait hipotesis dalam penelitian dengan melakukan perbandingan t-hitung dengan t-tabel. Pada Uji signifikansi dengan menggunakan α= 1 % (0,01) yang dilakukan melalui uji t sebagian atau secara parsial. Adapun hipotesisnya adalah:

1. H0 : $\beta i = 0$, variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat.
2. Ha : $\beta i \neq 0$, variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan wilayah antar kota di provinsi Jawa Barat.

dengan ketentuan jika :

1. Nilai t-hitung positif
   t-statistik > t-tabel artinya menerima Ha dan menolak H0 (berpengaruh)
   t-statistik < t-tabel artinya menolak Ha dan menerima H0 (tidak berpengaruh).
2. Nilai t-hitung negatif
   -t hitung < -t tabel artinya menerima Ha dan menolak H0 (berpengaruh)
   -t hitung > -t tabel artinya menolak Ha dan menerima H0 (tidak berpengaruh)
3. Nilai probabilitas
   Probabilitas < tingkat signifikansi (α) artinya menolak H0 menerima Ha (berpengaruh)
   Probabilitas > tingkat signifikansi (α) artinya menerima H0 menolak Ha (tidak berpengaruh)

3.5.3 Uji F

Uji F merupakan uji statistika yang menyajikan data mengenai hasil regresi yang hasilnya adalah signifikan , dalam uji ini akan diketahui variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independennya. Adapun hipotesis dalam uji F yaitu :

1. H0 : $\beta 1 = \beta 2 = \beta 3 = \beta 4 = \beta 5 = 0$, variabel bebas (independen) secara simultan tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (dependen.)

2. Ha : $\beta 1 \neq \beta 2 \neq \beta 3 \neq \beta 4 \neq \beta 5 \neq 0$, variabel bebas (independen) secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

dengan ketentuan jika :

1. Nilai F hitung dan F tabel

   F hitung > F tabel artinya menolak H0 dan menerima Ha (berpengaruh signifikan)

   F hitung < F tabel artinya menerima H0 dan menolak Ha (tidak berpengaruh signifikan)

2. Nilai Probabilitas

   Probabilitas < tingkat signifikansi (α), maka menolak H0 dan menerima Ha (berpengaruh signifikan)

   Probabilitas > tingkat signifikansi (α), maka menerima H0 dan menolak Ha (tidak berpengaruh signifikan)

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Bab ini akan menjabarkan hasil analisis penelitian mengenai Analisis Kesenjangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat Serta Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesenjangan pada Tahun 2018-2022. Data panel merupakan jenis model yang digunakan dalam penelitian ini, penggunaan model data panel dianggap memenuhi kriteria karena merupakan penggabungan antara jenis data cross section dan time series. Dalam penelitian, data cross section diwakilkan dengan 9 Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam rentang tahun 2017 sampai 2022. Kemudian data time series diwakilkan dalam rentang waktu yang penulis pilih yaitu 2017 hingga 2022. Sedangkan terkait sumber informasi serta publikasi data dalam penelitian diambil dari laman resmi BPS (Badan Pusat Statistik), open data milik Provinsi Jawa Barat, dan data pada laman resmi publikasi data oleh DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan variabel independen yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian variabel terikan atau dependennya adalah Ketimpangan Wilayah antar kota yang diproyeksikan melalui Indeks Williamson (IW).

Deskripsi data dalam penelitian ini memuat berbagai data statistik. Berkenaan dengan data statistik dalam penelitian terdiri dari mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Olahan data dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

	IW	DDF	BL	BTL	TK	IPM
Mean	1.903065	0.315079	2445.737	166.5356	558227.9	76.81593
Median	1.910922	0.304574	1818.700	103.7900	308462.5	76.17000
Maximum	1.975445	0.463968	6009.100	628.2000	1452223	82.50000
Minimum	1.806663	0.126377	594.70000	17.90000	84032.00	70.79000
Std. Dev.	0.057152	0.101409	1612.571	156.0565	479950.2	3.672000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat 54 data penelitian. Pada tahun 2017-2022 tingkat Indeks Williamson di seluruh Kota Provinsi Jawa Barat secara rata-rata yakni sebesar 1,9% dengan Indeks Williamson terendah pada tahun 2017 yang mana tingkat Indeks Williamsonnya sebesar 1,806662982. Sedangkan Indeks Williamson dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,975445 dengan standar deviasi 0,057152. Kemudian mengenai rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal di seluruh kota Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2017-2022 sebesar 0,315079. Derajat Desentralisasi Fiskal terendah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat terjadi pada tahun 2022 di Kota Bekasi yaitu berada pada angka 0,463968%. Kemudian, Derajat Desentralisasi Fiskal tertinggi tejadi pada tahun 2019 di Kota Banjar yakni 0,126377%.

Selanjutnya Belanja Langsung yang terjadi di seluruh kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022 rata-ratanya sebesar Rp. 2.445.737 Miliar dengan belanja langsung tertinggi terjadi di Kota Bandung pada tahun 2019 sebesar Rp.6009,10 Miliar. Sedangkan terendah yakni di Kota Banjar tahun 2020 sebesar Rp.594,7 Miliar dengan standar deviasi 1612,571.

Adapun Belanja Tidak Langsung di seluruh kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022 rata-ratanya sebesar Rp.166.5356 Miliar dengan belanja tidak langsung tertinggi terjadi di Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar Rp.628,20 Miliar. Sedangkan terendah yakni di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar Rp.17,90 Miliar dengan standar deviasi sebesar 156.0565.

Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2017-2022 secara rata-rata sebesar 558227.9 oang. Tenaga kerja tertinggi terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2022 sebesar 1.452.223. Sedangkan Tenaga Kerja terendah terjadi di Kota Banjar pada tahun 2017 sebesar 84032 dengan standar deviasi 479950.2.

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2017-2022 secara rata-rata sebesar 76,8%. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia tertinggi terjadi di Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar 82,50%. Sedangkan terendah di Kota Banjar pada tahun 2017 sebesar 70,79%.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Uji CEM, FEM, dan REM

Tahap ini merupakan langkah dimana data panel perlu melalui proses uji regresi untuk dapat menentukan metode terbaik yang digunakan sebagai analisis dalam data. Penentuan model terbaik dilakukan melalui hitungan menggunakan model regresi yaitu common effect model (CEM) dan random effect model (REM). Dalam *common effect*, perbedaan waktu serta individu dalam pendekatan ini akan diabaikan. Jika intersept dan slope pada *common effect model* diasumsikan sama baik, artinya akan ditemukan intersep yang berbeda dalam pendekatan *fixed effect model* untuk setiap substansi dan diasumsikan bahwa koefisien regresi siftanya sama dalam tiap individu maupun antar waktu (Widarjono, 2018).

Terdapat 3 jenis model regresi yang dilakukan secara bertahap, diawali dengan *common effect model*, *fixed effect model* hingga *random effect model*. Uji secara bertahap ini dilakukan dengan tujuan membandingkan hasil atas ketiga model, selanjutnya akan ditentukan model terbaik yang dipakai sebagai proses analisis selanjutnya.

Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Pengujian CEM, FEM, dan REM

Variabel	*Common Effect*		*Fixed Effect*		*Random Effect*	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob	Coefficient	Prob
C	1.294432	0.0000	-1.789426	0.0046	1.294432	0.0000
DDF	-0.181025	0.1854	-0.060203	0.4548	-0.181025	0.0000
LOG(BL)	-0.011399	0.7669	-0.083017	0.0057	-0.011399	0.2497
LOG(BTL)	0.033445	0.0059	0.016688	0.0059	0.033445	0.0000
LOG(TK)	-0.053035	0.0668	-0.215143	0.0010	-0.053035	0.0000
IPM	0.016569	0.0014	0.091356	0.0000	0.016569	0.0000
R.Squared	0.261426		0.959697		0.261426	
F-Stat	3.398016		73.26750		3.398016	
Prob. F-Stat	0.010434		0.000000		0.010434	
Observations						

Sesudah melalui proses pengujian tersebut, maka dilanjutkan dengan pengujian yang dilakukan melalui uji chow dan hausman terhadap ketiga model yaitu *Common effect, fixed effect,* dan *random effect* dengan tujuan mendapatkan model terbaik.

Sesudah melalui proses pengujian tersebut, maka dilanjutkan dengan pengujian yang dilakukan melalui uji chow dan hausman terhadap ketiga model yaitu *Common effect, fixed effect,* dan *random effect* dengan tujuan mendapatkan model terbaik.

4.3 Pemilihan Model Terbaik

Dalam menganalisis jenis data panel, perlu dilakukan terlebih dahulu pemilihan akan metode pendekatan analisis karena sifatnya wajib. Terdapat tiga metode pendekatan dalam memilih model terbaik terhadap data panel, yaitu Uji Chow, Hausman, dan *Langrange Multiplier* (LM).

4.3.1 Uji Chow

Uji chow merupakan uji dalam menentukan model terbaik data panel. Menurut (Ghozali, 2018) uji chow bertujuan untuk menetapkan antara model CEM atau FEM yang tepat untuk digunakan saat data panel di estimasi. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah sebagai berikut.

H0 = *Common Effect*

H1 = *Fixed Effect*

Tabel 4. 3 Uji Chow

Effects Test	**Statistic**	**d.f.**	**Prob.**
Cross-section F	86.627294	(8,40)	0.0000
Cross-section Chi-square	157.047729	8	0.0000

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai probabilitas yang diperoleh F-statistik adalah sebesar 0,0000 dengan tingkat signifikansi (α) 1% dimana 0,0000 < 0,01. Karena F-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan model terbaik yang digunakan adalah estimasi melalui *fixed effect model*. Sehingga pengujian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah Uji Hausman.

4.3.2 Uji Hausman

Menurut (Ghozali, 2018) Uji Hausman digunakan dengan tujuan pemilihan pendekatan model yang sepadan dengan data aktual. Model terbaik antara *fixed effect* dan *random effect* dilakukan pada Uji Hausman melalui prroses regresi. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah sebagai berikut.

H0 = *Random Effect*

H1 = *Fixed Effect*

Tabel 4. 4 Uji Hausman

Test Summary	***Chi-Sq. Statistic***	***Chi-Sq. d.f.***	***Prob.***
Cross-section random	693.018349	5	0.0000

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai probabilitas yang diperoleh *chi-square* adalah sebesar 0,0000 dengan tingkat signifikansi (α) 1% dimana 0,0000 < 0,01. Karena nilai *chi-square* lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan model terbaik yang digunakan dalam proses Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kota di provinsi Jawa Barat adalah estimasi melalui *fixed effect model*. Sehingga pengujian dengan pendekatan Langrange Multiplier tidak perlu dilakukan.

4.4 Model Terbaik

4.4.1 Model *Fixed Effect*

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel melalui 2 tahap yaitu Uji Chow dan Uji Hausman, maka ditetapkan model terbaiknya yaitu *Fixed Effect Model*. Jika dijabarkan lebih lanjut, koefisien regresi yang konstan besarnya dari waktu ke waktu terkandung di dalam model ini sehingga asumsinya adalah *slope* akan tetap, baik antar waktu maupun antar variabel.

Tabel 4. 5 Model Terbaik Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.789426	0.596694	-2.998902	0.0046
X1	-0.060203	0.079757	-0.754825	0.4548
LOG(X2)	-0.083017	0.028386	-2.924560	0.0057
LOG(X3)	0.016688	0.005739	2.907993	0.0059
LOG(X4)	-0.215143	0.060646	-3.547493	0.0010
X5	0.091356	0.004326	21.11630	0.0000

Effect Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.011367	R-squared	0.959697
Mean dependent var	1.903065	Adjusted R-squared	0.946598
S.D. dependent var	0.057152	S.E. of regression	0.013207
Akaike info criterion	-5.597692	Sum squared resid	0.006977
Schwarz criterion	-5.082029	Log likelihood	165.1377
Hannan-Quinn criter.	-5.398821	F-statistic	73.26750
Durbin-Watson stat	2.076415	Prob(F-statistic)	0.000000

Persamaan Regresi :

Y = -1.789426 – 0.060203*X1 – 0.083017*LOG(X2) +

0.016688*LOG(X3) – 0.215143*LOGX4 + 0.091356*X5 + e

Keterangan :

Y = Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)

β0 = Koefisien Intersept

β1 = Koefisien pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

β2 = Koefisien pengaruh Belanja Langsung

β3 = Koefisien pengaruh Belanja Tidak Langsung

β4 = Koefisien pengaruh Tenaga Kerja (TK)

β5 = Koefisien pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4.5 Pengujian Statistik

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam pengujian statistik koefisien determinasi, akan dilihat seberapa besar kepastian atas suatu model dalam mengimplementasikan semua variabel dependen. Nilai koefisien ditentukan pada rentang nol dan satu, semakin besar nilai koefisien artinya variabel bebas mampu memberikan hampir seluruh informasi yang

dibutuhkan untuk melakukan estimasi atas variasi variabel terikat. Sedangkan, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat akan semakin terbatas jika nilai koefisiennya semakin kecil atau semakin mendekati 0 (nol).

Berdasarkan tabel, bahwa DDF, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja, dan Indeks Pemabngunan Manusia terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022 dalam *fixed effect model* memperoleh estimasi pada *R-Squared* sebesar 0.959697 atau 95.96% perubahan terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dideskripsikan oleh variabel bebas dalam model tersebut dan 4.04% sisanya dideskripsikan oleh variabel lain diluar model.

4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen secara bersamaan dipengaruhi oleh variabel independen. diperlukan untuk mengetahui apakah variable bebas akan secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui hasil uji F, maka perlu membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, adapun persamaan F-tabel yaitu :

$F_{tabel}DF1 = k - 1$

$F_{tabel}DF2 = n - k$

dimana,

n = total observasi

k = total variabel terikat dan bebas

Nilai F-tabel akan diperoleh setelah menemukan hasil proyeksi antara $F_{tabel}DF1$ dan $F_{tabel}DF2$ dengan alpha (α) sebesar 1% atau 0,01. Menurut hitungan menggunakan *software Microsoft Excel*, F-tabel diformulasikan dengan FINV(α :k-1; n-k). Sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah α = 0.01 (6 – 1= 5; 56 – 4 = 48) dimana nilai F-tabel nya adalah 3.425123.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, perbadingan antara F-hitung dan F-tabel ialah besarnya nilai F hitung > F tabel yaitu 73.26750 > 3.425123, artinya H0 tidak diterima dan tidak menolak H1 sehingga variabel DDF, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen yang dalam hal ini adalah Ketimpangan Wilayah Antar Kota. Sementara itu, perbandingan antara nilai

probabilitas F-statistik dengan derajat keyakinan ialah 0.000000 < 0.01. artinya, variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat dengan derajat keyakinan 1%.

4.5.3 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Keputusan atas uji t dilakukan berdasarkan perbandingan nilai antara nilai t-hitung dengan t-tabel yang diikuti dengan mengamati nilai probabilitasnya. Ketika besarnya nilai t-hitung < t-tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan ketika nilai t-hitung > t-tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Adapun formula perhitungan t-tabel melalui *software Microsoft Excel* adalah TINV (probability, degree freedom) sehingga t-tabel yang dihasilkan ialah (α, n-k) dimana n = 54 ; k = 6. Sehingga diperoleh besarnya nilai t-tabel ialah 2.682204.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan keterkaitan antar variabel, berdasarkan derajat keyakinan yaitu α = 1%. Ditinjau melalui data dalam tabel dibawah dengan α = 1% maka hipotesisnya :

1. X1 (Derajat Desentralisasi Fiskal)
   H0 : β1 = 0, variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y
   Ha : β1 < 0, variabel X1 berpengaruh negatif terhadap variabel Y
2. X2 (Belanja Langsung)
   H0 : β2 = 0, variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y
   Ha : β2 < 0, variabel X2 berpengaruh negatif terhadap variabel Y
3. X3 (Belanja Tidak Langsung)
   H0 : β3 = 0, variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y
   Ha : β3 > 0, variabel X3 berpengaruh positif terhadap variabel Y
4. X4 (Tenaga Kerja)
   H0 : β4 = 0, variabel X4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y
   Ha : β4 < 0, variabel X4 berpengaruh negatif terhadap variabel Y
5. X5 (Indeks Pembangunan Manusia)
   H0 : β5 = 0, variabel X5 tidak berpengaruh terhadap variabel Y
   Ha : β5 < 0, variabel X5 berpengaruh negatif terhadap variabel Y

Tabel 4. 6 Hasil Uji t-statistik (a=1%)

Variabel	Coefficient	t-Statistik	t-tabel	Prob	Ket
C	-1.789426	-2.998902	2.682204	0.0000	-
DDF	-0.060203	-0.754825	2.682204	0.4548	Tidak Signifikan
LOG(BL)	-0.083017	-2.924560	2.682204	0.0057	Signifikan
LOG(BTL)	0.016688	2.907993	2.682204	0.0059	Signifikan
LOG(TK)	-0.215143	-3.547493	2.682204	0.0010	Signifikan
IPM	0.091356	21.11630	2.682204	0.0000	Signifikan

1. Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

   Berdasarkan hasil olah data, nilai dari probabilitas variabel Derajat Desentralisasi Fiskal ialah 0.4548 > tingkat signifikansi 0,01 (1%), maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga variabel DDF secara independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota.

2. Variabel Belanja Langsung

   Berdasarkan hasil olah data, nilai dari probabilitas variabel Belanja Langsung ialah 0.0057 < tingkat signifikansi 0,01 (1%), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel Belanja Langsung secara independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota.

3. Variabel Belanja Tidak Langsung

   Berdasarkan hasil olah data, nilai dari probabilitas variabel Belanja Tidak Langsung ialah 0.0059 < tingkat signifikansi 0,01 (1%), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel Belanja Tidak Langsung secara independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota.

4. Variabel Tenaga Kerja (TK)

   Berdasarkan hasil olah data, nilai dari probabilitas variabel Tenaga Kerja ialah 0.0010 < tingkat signifikansi 0,01 (1%), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel Tenaga Kerja secara independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota.

5. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

   Berdasarkan hasil olah data, nilai dari probabilitas variabel Indeks Pembangunan Manusia ialah 0.0000 < tingkat signifikansi 0,01 (1%), maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel Indeks Pembangunan Manusia secara independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota.

4.6 Interpretasi dan Pembahasan

4.6.1 Variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Secara teoritis, Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan formula yang melihat seberapa besar pemerintah pusat memberikan interverensi terhadap pemerintah daerah dalam melakukan otonomi daerah . Derajat Desentralisasi Fiskal digambarkan melalui angka dari perhitungan rasio antara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapaatan Daerah (TPD). Jika Derajat Desentralisasi Fiskal nilainya semakin rendah, maka semakin kecil juga porsi belanja daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Hasil pengujian data dalam penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2017-2022. Maka secara independen varibael Derajat Desentralisasi Fiskal tidak mempengaruhi variabel Ketimpangan Wilayah.

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Derajat Kemandirian di Provinsi Jawa Barat tidak menginterpretasikan adanya ketimpangan wilayah. Berdasarkan kajian yang dilakukan (Uzantha, 2011) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Didukung juga oleh

(Kundhani, 2015) dalam penelitiannya mendapatkan hasil yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. (Kundhani, 2015) juga menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal tidak sepenuhnya mendorong terwujudnya pemerataan, sehingga tidak signifikannya keberpengaruhan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan diakibatkan oleh manajemen keuangan di daerah yang kurang baik. Ia juga menjelaskan bahwa dapat ditinjau dari belanja pegawai yang mendominasi alokasi belanja, alokasi belanja modal mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Jika dilihat dari sudut pandang realisasi, masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terjadi di Provinsi Jawa Barat yang terbilang besar sehingga memberikan indikasi tidak efisien serta efektifnya penyelenggaraan anggaran. Dikutip dari berita dalam (Sekretariat Kabinet RI, 2019) Provinsi Jawa Barat menempati peringkat kedua setelah Provinsi Jakarta dengan SiLPA tertinggi yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000.000,00. Dalam berita tersebut juga mendagri menilai bahwa hal tersebut menunjukkan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan atas berbagai macam program tidak dijalankan dengan baik.

4.6.2 Variabel Belanja Langsung

Berdasarkan hasil pengolahan serta pengujian data, menunjukkan bahwa variabel Belanja Langsung memiliki huungan negatif terhadap adanya Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2017-2022. Dibuktikan dengan hasil nilai probabilitas sebesar 0,0057 serta koefisiennya sebesar -0,83017. Besarnya nilainya tersebut dapat di interpretasikan bahwa setiap penambahan 1% Belanja Langsung maka Ketimpangan Wilayah Antar Kota akan turun sebesar 0,83017%. Berdasarkan penelitian (Silviana & Tallo, 2020) yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa belanja langsung melalui belanja modal khususnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur mempengaruhi adanya kesenjangan wilayah, infrastruktur yang tidak memadai akan menghambat mobilitas barang dan jasa. Sejalan dengan penelitian (Sjafrizal, 2008) bahwa ketimpangan pembangunan wilayah bisa terjadi karena kurangnya mobilitas barang dan jasa.

Pada dasarnya, secara spesifik ketimpangan antar daerah bisa terjadi karena akibat dari adanya ketidakmerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur yang

terdapat pada tiap wilayah kota. Sejalan pada penelitian (Gratia Y. C. & Nugroho, 2020) yang menyebutkan bahwa keputusan yang diambil dalam setiap alokasi anggaran belanja daerah berpengaruh besar terhadap ketimpangan, wilayah dengan alokasi belanja langsung (bersifat investasi) lebih tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah dengan alokasi belanja langsung yang lebih sedikit.

4.6.3 Variabel Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan hasil pengolahan serta pengujian data, menunjukkan bahwa variabel Belanja Tidak Langsung memiliki hubungan positif terhadap adanya Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2017-2022. Dapat dilihat melalui besarnya nilai probabilitas variabel Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 0,0059 serta nilai koefisien sebesar 0,016688 yang didefinsikan bahwa ketika nilai Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan 1%, maka Ketimpangan Wilayah Antar Kota akan naik juga sebesar 0,016688%. Artinya, hubungan variabel Belanja Tidak Langsung dengan Ketimpangan Wilayah Antar Kota ialah bergerak searah. .

Secara mendasar, bantuan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dialokasikan melalui tiga dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam mengatasi kesenjangan wilayah, maka DAU berperan sebagai alat untuk meminimalisir kesenjangan antara wilayah kaya dengan wilayah miskin yang dimuat dalam 2 (dua) aspek yakni pemenuhan alokasi mendasar seperti gaji PNS yang terdapat pada komponen belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai dan adanya *fiscal gap*. Sedangkan, wilayah kota dengan SDA dan PAD rendah pastinya mengalami celah fiskal yang berakibat pada minimnya kemampuan pendanaan yang digunakan untuk melakukan program pembangunan di wilayahnya. Berdasarkan penelitian (Sasana, 2011) peristiwa yang hadir saat era otonomi adalah bahwa transfer pemerintah khususnya Dana Alokasi Umum menjadi begitu mendominasi dan terlebihan berlebihan dalam pembiayaan belanja daerah yang mengakibatkan minimnya pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diindikasikan sebagai *fiscal illusion* atau celah fiskal.

4.6.4 Variabel Tenaga Kerja (TK)

Variabel Tenaga Kerja menurut penelitian ini menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel tenaga kerja ialah diperoleh sebesar 0,0010 dan nilai koefisien sebesar -0,215143. Ini berarti menginterpretasikan bahwa jika Tenaga Kerja mengalami kenaikan 1% maka Ketimpangan Wilayah Antar Kota akan turun sebesar 0,215143%. Secara tidak langsung, ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan (Fleisher, Li, & Zhao, 2010) yaitu ketika Sumber Daya Manusia dalam hal ini Tenaga Kerja memiliki kualitas dan kuantitas yang baik maka dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah, mereka berpandangan bahwa investasi pada SDM dapat memberikan keuntungan yang sedikit lebih tinggi atau sebanding di wilayah pedalaman dibandingkan dengan hanya investasi pada bidang infrastruktur yang hanya memberikan keuntungan tinggi pada wilayah maju.

Menurut penelitian (Endarwati U. , 2017) tenaga kerja secara spasial berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi di tiap provinsi yang terdapat pada Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Jawa sudah mengalami peralihan zaman yang mengarah kepada sektor industri, sehingga menciptakan aktivitas penyerapan tenaga kerja pertanian menuju sektor industri (mobilisasi tenaga kerja). Adanya ketimpangan yang terjadi antar wilayah kota yang berkaitan dengan tenaga kerja merupakan gambaran bahwa mobilisasi terhadap tenaga kerja belum berjalan dengan sempurna di seluruh kota Provinsi Jawa Barat, padahal seharusnya mobilisasi tenaga kerja memberikan dampak baik terhadap distribusi pendapatan. Fenomena ini diakibatkan oleh adanya perbedaan keadaan geografis serta disparitas penduduk di masing-masing wilayah (Endarwati, Saenong, & Rahim, 2017).

4.6.5 Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu hal yang mempengaruhi tercapainya pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah mekanisme pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia pada dasarnya adalah ukuran atas capaian pembangunan manusia yang dibangun lewat pendekatan dasar tiga dimensi yaitu meliputi kepanjangan umur dan kesehatan, wawasan pengetahuan, dan kondisi kelayakan hidup (Badan Pusat

Statistik). Dalam rentang waktu 2017-2022, IPM Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil pengujian serta pengolahan data dalam penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan positif dan signifikan yang dibuktikan melalui nilai probabilitas Indeks Pembangunan Manusia yaitu 0,0000 serta besar nilai koefisiennya yakni 0,091356. Artinya, koefisien regresi tersebut dapat diartikan bahwa ketika terjadi penambahan 1% Indeks Pembangunan Manusia maka Ketimpangan Wilayah Antar Kota akan mengalami kenaikan sebesar 0,091356%. Hipotesis ini didukung oleh Nasution (2020) yang menyebutkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meminimalisir kesenjangan diantaranya melalui pola pemerintah yang berubah, perubahan kapasitas pasar domestik, kegiatan wirausaha berkurang, serta ketidakstabilan bagi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kelompok miskin akan semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan akan memperluas ketimpangan dan memperlemah pertumbuhan ekonomi. Didukung juga oleh penelitian (Putri dkk, 2015) yang menyatakan bahwa tidak meratanya Indeks Pembangunan Manusia antar wilayah mengakibatkan wilayah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi dapat memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan kualitas masyarakat (manusia) yang lebih baik sehingga dapat menopang pembangunan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan proses analisis hubungan antara Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Belanja Langsuung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017-2022. Kesimpulan atas pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat dikarenakan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak cukup hanya didasarkan pada perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal. Sehingga tidak dapat menginterpretasikan korelasi DDF dengan kesenjangan wilayah secara akurat.
2. Belanja Langsung memiliki hubungan negatif terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barta pada Tahun 2017-2022. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja langsung seperti belanja modal dalam mengupayakan pembangunan infrastruktur akan menurunkan tingkat ketimpangan wilayah antar kota.
3. Belanja Tidak Langsung memiliki hubungan positif terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barta pada Tahun 2017-2022. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi alokasi belanja tidak langsung yang ditandai dengan belanja pegawai melalui DAU lebih yang dominan dibandingkan PAD berdampak pada ketimpangan wilayah antar kota juga semakin meningkat.
4. Tenaga Kerja memiliki hubungan negatif terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barta pada Tahun 2017-2022. Ini menunjukkan bahwa, semakin meningkat jumlah Tenaga Kerja atau masyarakat produktif maka akan menekan tingkat ketimpangan antar wilayah kota.

5. Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan positif terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017-2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya Indeks Pembangunan Manusia juga diikuti dengan meningkatnya ketimpangan wilayah kota.

5.2 Saran

Kesenjangan wilayah antar kota di Provinsi Jawa Barat dapat diwakilkan oleh komponen diantaranya Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia. Terdapat hal-hal yang perlu diamati lebih jauh khususnya bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Pemerintah daerah lebih memberikan fokusnya terhadap alokasi belanja modal serta meninjau kembali realisasi penyelenggaraan anggaran pemerintah, sehingga DDF akan dapat mencerminkan pengaruhnya terhadap ketimpangan wilayah.
2. Pemerintah secara konsisten mengupayakan aliran belanja langsung dalam memberikan pembiayaan agar pemerataan terhadap belanja daerah di sektor riil seperti pembangunan sarana dan prasarana publik bisa dirasakan oleh tiap wilayah.
3. Pemakaian dana atas anggaran pemerintah yang digunakan untuk meminimalisir ketimpangan merujuk pada DAU yaitu dalam komponen belanja tidak langsung berupa belanja pegawai terbilang terlalu berlebihan. Pemerintah daerah seharusnya mulai menyadari bahwa mengatasi ketimpangan bukan saja dapat ditempuh melalui belanja tidak langsung tapi juga belanja langsung seperti pembangunan infrstruktur. Hal tersebut juga tertera didalam Kajian Fiskal Nasional Kementrian Keuangan pada tahun 2021 bahwa belanja infrastruktur masuk kedalam potensi ketiga dari tiga potensi ekonomi Jawa Barat yang perlu dimaksimalkan oleh pemerintah.
4. Diikuti dengan terus meningkatnya jumlah tenaga kerja, diperlukan pemberdayaan terhadap tenaga kerja yang menjadi Sumber Daya Manusia penting dalam perekonomian. Pemberdayaan tenaga kerja tentu dapat

ditempuh melalui pendidikan yang memadai agar terciptanya masyarakat produktif, adapun penggerak lainnya adalah menciptakan sarana dan prasarana yang mumpuni dalam mendorong perubahan kepada era sektor industri yang tidak dapat dihindari.

5. Meningkatkan kembali fokus pemerintah terhadap pembangunan manusia karena sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusianya, dilakukan melalui kebijakan yang berkonsentrasi pada kesehatan, pendidikan, serta pengeluaran tiap wilayah kota baik yang dekat dengan ibukota maupun yang jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2014). *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alvaro, R. (2020). Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Budget*, 17.

Alvaro, R. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Daerah Tertinggal. *Jurnal Budget*, 3.

Apriliani, S. (2023). Pengaruh Inflasi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022. *Repository Universitas Siliwangi*, 2.

Aprilianti, V., & Harkeni, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*.

Badan Pusat Statistik. (2014). "Indeks Pembangunan Manusia". Diakses Desember 2023. https://ppukab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html

Badan Pusat Statistik. 2021. Diakses September 2023. Indeks Pembangunan Manusia.

Badan Pusat Statistik. 2021. "Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah 2016-2020." Diakses januari 2024. https://jateng.bps.go.id/publication/2021/12/10/554e2dab3fa3d0e23acc9979/analisis-indeks-williamson-provinsi-jawa-tengah-2016-2020.html

Badan Pusat Statistik. 2021. "Indeks Pembangunan Manusia". Diakses 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur. 2022. Diakses Oktober 2023. https://bappeda.jatimprov.go.id/2023/02/13/ekonomi-jawa-timur-tahun-2022-tumbuh-534-persen/

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2023. Diakses September 2023. https://jabar.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. 2023. Diakses Febuari 2024. https://bangkakab.bps.go.id/indicator/6/82/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2023. Diakses September 2023. DJPK Kementrian Keuangan: https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-belanja-daerah

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2023. Diakses September 2023. DJPK Kementrian Keuangan: https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-belanja-daerah

bagaswati, n. p. (2017). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Jawa Tahun 2008-2015. *UMY Repository*, 12.

Bappenas. (2011). *Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2011*. Jakarta: Bappenas.

Bartolini, D., Stossberg, S., & Blöchliger, H. (2016). Fiscal Decentralisation And Regional Disparities. *Economics Department Working Papers*, 18.

Endarwati, U. (2017). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 82.

Endarwati, U., Saenong, Z., & Rahim, M. (2017). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP).*

Fauzi, F. (2017). K-Nearset Neighbor (K-NN) dan Support Vector Machine (SVM) untuk Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah. *Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences*.

Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 20.

Fleisher, B., Li, H., & Zhao, M. Q. (2010). Human capital, economic growth, and regional inequality in China. *Journal of Development Economics*.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gratia, Y. C., & Nugroho. (2020). Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Di 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Diponegoro Journal of Economics*.

Gratia, Y. C., & SBM, N. (2020). Analisis Ketimpangan Antar Wilayah di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Diponegoro Journal Of Economics*.

Gulo, A. K., Zamzami, & Bhakti, A. (2017). Dampak alokasi belanja langsung terhadap ketimpangan ekonomi wilayah (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi,dan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Paradigma Ekonomika*.

Harto, P., Utami, I., & Wardhani, R. S. (2022). Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.

Hartono, B. (2008). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro University Institutional Repository*, 23.

Hasyim, S. H. (2015). Population, Growth and Economic Inequality in Urban Areas Mamminasata, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Science and Research*.

Jatiningrum, C., & Marantika, A. (2021). *Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Enterprise Risk Management Di Indonesia.* Indramayu: Penerbit Adab.

Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2023. Diakses Oktober 2023. *pdrb nasional.* Satu Data Kemnaker.https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2023/07/files/data/1690448177682_3.%2520Pr

Kundhani, E. Y. (2015). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah (Studi Kausus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Tesis*, 4.

Mulyani, S. (2021). APBN 2020 : Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *2020*, p. 15.

Nasution, M. (2020). Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya Dengan Belanja Pemerintah: Studi Di Indonesia. *Jurnal Budget*, 85.

Pandiangan, A. G., Priyarsono, D. S., & Probokawuryan, M. (2021). Pengaruh Dana Desa terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 143.

Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*.

Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Journal of Economics and Policy*, 90.

Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuesioner.* Indramayu: Penerbit Adab.

Rosmeli. (2014). Dampak Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.

Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 49.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2019. "*SiLPA Provinsi Masih Sangat Besar, Mendagri Minta Penyerapan APBD Digenjot*". Jakarta Pusat: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/silpa-provinsi-masih-sangat-besar-mendagri-minta-penyerapan-apbd-digenjot/

Septiani, E. (2022). Pengaruh PDRB, Rasio Ketergantungan Penduduk, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Institutional Repositories & Scientific Journals*.

Siagian, A. (2010). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat). *UNDIP-IR*.

Siallagan, D. S. (2019). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2017. *Repositori Universitas Siliwangi*.

Silviana, R., & Tallo, A. J. (2020). Analisis Ketimpangan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Antar (Kabupaten/Kota) Di Provinsi Jawa Barat. *Aksara*.

Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.

Sopandi, D. (2022). *Kajian Fiskal Regional*. Bandung: Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perbendaharaan.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, & Sadono. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Supartoyo, Y. H., Tatuh, J., & Sendouw, R. (2022). The economic growth and the characteristic the case of Indonesia. *BMEB : Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.

Uzantha, S. P. (2011). Analisa Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat. *Skripsi*.

Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 146.

LAMPIRAN

Data Variabel Dependent dan Independent

Kota Jawa Barat	Tahun	IW	DDF	BL	BTL	TK	IPM
Kota Depok	2017	1,806663	0,425212	2563,8	108,35	1009401	79,83
	2018	1,863216	0,360409	2646,4	118,70	1028292	80,29
	2019	1,892585	0,399533	3075,1	156,15	1112358	80,82
	2020	1,929258	0,397068	2811,7	387,46	1077600	80,97
	2021	1,951224	0,45258	2991,1	276,55	1089295	81,37
	2022	1,975445	0,448126	3424,3	189,83	1160313	81,86
Kota Bogor	2017	1,806663	0,427281	2130,1	115,52	448386	75,16
	2018	1,863216	0,391721	2237,0	169,64	471775	75,66
	2019	1,892585	0,39685	2394,0	134,48	486867	76,23
	2020	1,929258	0,359066	2085,1	269,76	449120	76,11
	2021	1,951224	0,406552	2492,5	145,21	466645	76,59
	2022	1,975445	0,412388	2716,7	219,72	496570	77,17
Kota Bandung	2017	1,806663	0,449443	5190,3	351,45	1116529	80,31
	2018	1,863216	0,432928	5600,0	514,43	1107986	81,06
	2019	1,892585	0,3993	6009,1	303,05	1183193	81,62
	2020	1,929258	0,365662	4812,3	594,81	1167849	81,51
	2021	1,951224	0,376136	5254,0	421,61	1185623	81,96
	2022	1,975445	0,430085	5845,3	628,20	1298537	82,50
Kota Tasik	2017	1,806663	0,194565	1791,5	73,29	290396	71,51
	2018	1,863216	0,152352	1817,6	97,31	287233	72,03
	2019	1,892585	0,150741	1854,8	65,58	301081	72,84
	2020	1,929258	0,178493	1656,5	86,68	315844	73,04
	2021	1,951224	0,219228	1909,7	103,82	316349	73,31
	2022	1,975445	0,176556	1819,8	103,72	324099	73,83
Kota Cirebon	2017	1,806663	0,319344	1346,8	62,63	142246	74
	2018	1,863216	0,309519	1377,6	48,42	148033	74,35
	2019	1,892585	0,281401	1530,9	56,43	138667	74,92
	2020	1,929258	0,267583	1485,5	97,36	139334	74,89
	2021	1,951224	0,297774	1304,3	30,31	139397	75,25
	2022	1,975445	0,36571	1379,7	54,10	149860	75,89
Kota Bekasi	2017	1,806663	0,418012	4846,5	135,91	1266692	80,3
	2018	1,863216	0,413804	4844,6	157,13	1325953	81,04
	2019	1,892585	0,409487	5363,8	204,11	1383287	81,59
	2020	1,929258	0,402365	4406,2	381,24	1348530	81,50
	2021	1,951224	0,439817	5092,2	612,65	1376447	81,95
	2022	1,975445	0,463968	4667,1	289,98	1452223	82,46

Kota Cimahi	2017	1,806663	0,250507	1321,5	17,90	272017	76,95
	2018	1,863216	0,25453	1466,7	22,41	273955	77,56
	2019	1,892585	0,251826	1481,1	20,63	272553	78,11
	2020	1,929258	0,257675	1190,5	91,85	254699	77,83
	2021	1,951224	0,266489	1446,4	35,08	254059	78,06
	2022	1,975445	0,296586	1330,3	49,27	286038	78,77
Kota Sukabumi	2017	1,806663	0,295198	1111,2	49,07	130909	73,03
	2018	1,863216	0,296085	1145,1	40,81	132848	73,55
	2019	1,892585	0,267562	1263,3	44,79	140827	74,31
	2020	1,929258	0,288022	1143,7	58,39	122662	74,21
	2021	1,951224	0,276827	1125,4	75,67	128395	74,60
	2022	1,975445	0,299628	1185,0	70,78	145522	75,40
Kota Banjar	2017	1,806663	0,15452	690,4	97,23	84032	70,79
	2018	1,863216	0,145207	700,2	103,76	85113	71,25
	2019	1,892585	0,126377	747,2	106,46	88846	71,75
	2020	1,929258	0,153314	594,7	151,12	91602	71,70
	2021	1,951224	0,169677	654,5	100,13	88631	71,92
	2022	1,975445	0,173159	698,7	91,98	89588	72,55

Hasil Uji Eviews

Uji *Common Effect*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/16/24 Time: 10:21
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.294432	0.243191	5.322701	0.0000
X1	-0.181025	0.134734	-1.343576	0.1854
LOG(X2)	-0.011399	0.038231	-0.298159	0.7669
LOG(X3)	0.033445	0.011609	2.880974	0.0059
LOG(X4)	-0.053035	0.028277	-1.875530	0.0668
X5	0.016569	0.004902	3.380203	0.0014

Root MSE	0.048660	R-squared	0.261426
Mean dependent var	1.903065	Adjusted R-squared	0.184491
S.D. dependent var	0.057152	S.E. of regression	0.051612
Akaike info criterion	-2.985697	Sum squared resid	0.127861
Schwarz criterion	-2.764699	Log likelihood	86.61381
Hannan-Quinn criter.	-2.900466	F-statistic	3.398016
Durbin-Watson stat	0.386155	Prob(F-statistic)	0.010434

Uji *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/16/24 Time: 10:22
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.789426	0.596694	-2.998902	0.0046
X1	-0.060203	0.079757	-0.754825	0.4548
LOG(X2)	-0.083017	0.028386	-2.924560	0.0057
LOG(X3)	0.016688	0.005739	2.907993	0.0059
LOG(X4)	-0.215143	0.060646	-3.547493	0.0010
X5	0.091356	0.004326	21.11630	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.011367	R-squared	0.959697
Mean dependent var	1.903065	Adjusted R-squared	0.946598
S.D. dependent var	0.057152	S.E. of regression	0.013207
Akaike info criterion	-5.597692	Sum squared resid	0.006977
Schwarz criterion	-5.082029	Log likelihood	165.1377
Hannan-Quinn criter.	-5.398821	F-statistic	73.26750
Durbin-Watson stat	2.076415	Prob(F-statistic)	0.000000

Uji *Random Effect*

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/16/24 Time: 10:23
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 54
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.294432	0.062232	20.80027	0.0000
X1	-0.181025	0.034478	-5.250479	0.0000
LOG(X2)	-0.011399	0.009783	-1.165160	0.2497
LOG(X3)	0.033445	0.002971	11.25839	0.0000
LOG(X4)	-0.053035	0.007236	-7.329272	0.0000
X5	0.016569	0.001254	13.20929	0.0000

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	0.013207	1.0000

Weighted Statistics			
Root MSE	0.048660	R-squared	0.261426
Mean dependent var	1.903065	Adjusted R-squared	0.184491
S.D. dependent var	0.057152	S.E. of regression	0.051612
Sum squared resid	0.127861	F-statistic	3.398016
Durbin-Watson stat	0.386155	Prob(F-statistic)	0.010434

Unweighted Statistics			
R-squared	0.261426	Mean dependent var	1.903065
Sum squared resid	0.127861	Durbin-Watson stat	0.386155

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	86.627294	(8,40)	0.0000
Cross-section Chi-square	157.047729	8	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/16/24 Time: 10:24
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.294432	0.243191	5.322701	0.0000
X1	-0.181025	0.134734	-1.343576	0.1854
LOG(X2)	-0.011399	0.038231	-0.298159	0.7669
LOG(X3)	0.033445	0.011609	2.880974	0.0059
LOG(X4)	-0.053035	0.028277	-1.875530	0.0668
X5	0.016569	0.004902	3.380203	0.0014

Root MSE	0.048660	R-squared	0.261426
Mean dependent var	1.903065	Adjusted R-squared	0.184491
S.D. dependent var	0.057152	S.E. of regression	0.051612
Akaike info criterion	-2.985697	Sum squared resid	0.127861
Schwarz criterion	-2.764699	Log likelihood	86.61381
Hannan-Quinn criter.	-2.900466	F-statistic	3.398016
Durbin-Watson stat	0.386155	Prob(F-statistic)	0.010434

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	693.018349	5	0.0000

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.060203	-0.181025	0.005173	0.0930
LOG(X2)	-0.083017	-0.011399	0.000710	0.0072
LOG(X3)	0.016688	0.033445	0.000024	0.0006
LOG(X4)	-0.215143	-0.053035	0.003626	0.0071
X5	0.091356	0.016569	0.000017	0.0000

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/16/24 Time: 10:27
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.789426	0.596694	-2.998902	0.0046
X1	-0.060203	0.079757	-0.754825	0.4548
LOG(X2)	-0.083017	0.028386	-2.924560	0.0057
LOG(X3)	0.016688	0.005739	2.907993	0.0059
LOG(X4)	-0.215143	0.060646	-3.547493	0.0010
X5	0.091356	0.004326	21.11630	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.011367	R-squared	0.959697
Mean dependent var	1.903065	Adjusted R-squared	0.946598
S.D. dependent var	0.057152	S.E. of regression	0.013207
Akaike info criterion	-5.597692	Sum squared resid	0.006977
Schwarz criterion	-5.082029	Log likelihood	165.1377
Hannan-Quinn criter.	-5.398821	F-statistic	73.26750
Durbin-Watson stat	2.076415	Prob(F-statistic)	0.000000

Model Terbaik *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 01/16/24 Time: 10:22
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.789426	0.596694	-2.998902	0.0046
X1	-0.060203	0.079757	-0.754825	0.4548
LOG(X2)	-0.083017	0.028386	-2.924560	0.0057
LOG(X3)	0.016688	0.005739	2.907993	0.0059
LOG(X4)	-0.215143	0.060646	-3.547493	0.0010
X5	0.091356	0.004326	21.11630	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.011367	R-squared	0.959697
Mean dependent var	1.903065	Adjusted R-squared	0.946598
S.D. dependent var	0.057152	S.E. of regression	0.013207
Akaike info criterion	-5.597692	Sum squared resid	0.006977
Schwarz criterion	-5.082029	Log likelihood	165.1377
Hannan-Quinn criter.	-5.398821	F-statistic	73.26750
Durbin-Watson stat	2.076415	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran Olahan Data Excel

Hasil Estimasi Eview Pengujian CEM, FEM, REM

Variabel	*Common Effect*		*Fixed Effect*		*Random Effect*	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob	Coefficient	Prob
C	1.294432	0.0000	-1.789426	0.0046	1.294432	0.0000
X1	-0.181025	0.1854	-0.060203	0.4548	-0.181025	0.0000
X2	-0.011399	0.7669	-0.083017	0.0057	-0.011399	0.2497
X3	0.033445	0.0059	0.016688	0.0059	0.033445	0.0000
X4	-0.053035	0.0668	-0.215143	0.0010	-0.053035	0.0000
X5	0.016569	0.0014	0.091356	0.0000	0.016569	0.0000
R.Squared	0.261426		0.959697		0.261426	
F-Stat	3.398016		73.26750		3.398016	
Prob. F-Stat	0.010434		0.000000		0.010434	
Observations						

Hasil Uji T Statistik

Variabel	**t-statistik**	**t-tabel**	**Probabilitas**	**Keterangan**
X1	-0.754825	2.682204	**0.4548**	Tidak Signifikan
X2	-2.924560	2.682204	**0.0057**	Signifikan
X3	2.907993	2.682204	**0.0059**	Signifikan
X4	-3.547493	2.682204	**0.0010**	Signifikan
X5	21.11630	2.682204	**0.0000**	Signifikan
Dengan alpha = 1%, t-tabel; = (a,n-k) n = 54 ; k=6				